

ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP LIKUIDITAS

**(Studi Empiris pada Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Indeks
LQ 45 tahun 2011-2013)**



SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Sarjana (S1)
pada Program Sarjana Fakultas Ekonomika dan Bisnis
Universitas Diponegoro

Disusun oleh :

CITA RATNA SETYAMURTI

NIM. 12030111130120

FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2015

PERSETUJUAN SKRIPSI

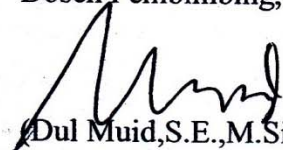
Nama Penyusun : Cita Ratna Setyamurti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130120
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi

Judul Usulan Penelitian Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP LIKUIDITAS**

Dosen Pembimbing : Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.

Semarang, 2 Maret 2015

Dosen Pembimbing,


(Dul Muid, S.E., M.Si., Akt.)

NIP.196505131994031002

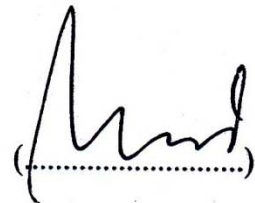
PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN

Nama Penyusun : Cita Ratna Setyamurti
Nomor Induk Mahasiswa : 12030111130120
Fakultas/Jurusan : Ekonomika dan Bisnis/Akuntansi
Judul Skripsi : **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP LIKUIDITAS (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN NON-KEUANGAN YANG TERDAFTAR DI INDEKS LQ 45 TAHUN 2011-2013)**

Telah dinyatakan lulus pada tanggal 17 Maret 2015

Tim Penguji :

1. Drs. Abdul Muid, M.Si., Akt



(.....)

2. Dr. Dwi Ratmono, M.Si., Akt



(.....)

3. Aditya Septiani., S.E., M.Si., Akt



(.....)

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Cita Ratna Setyamurti, menyatakan bahwa skripsi dengan judul: **ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP LIKUIDITAS** adalah hasil tulisan saya sendiri. Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan/atau tidak terdapat sebagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin itu, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan penulis aslinya.

Apabila saya melakukan tindakan yang bertentangan dengan hal tersebut di atas, baik disengaja maupun tidak disengaja, dengan ini saya menyatakan menarik skripsi yang saya ajukan sebagai hasil tulisan saya sendiri ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, berarti gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh universitas batal saya terima.

Semarang, 2 Maret 2015

Yang membuat pernyataan

Cita Ratna Setyamurti

NIM.12030111130120

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan.
(Amsal 4:23)
2. Serahkanlah segala kekuatiranmu kepada-Nya, sebab Ia yang memelihara kamu.
(1 Petrus 5:7)

Skripsi ini saya persembahkan kepada:

1. Tuhan Yesus Kristus
2. Orangtua dan Kedua Saudaraku
3. Aditya Rangga Fergiawan
4. Sahabat-sahabat Terkasih
5. Teman-teman Seperjuangan
6. Keluarga KKN

ABSTRACT

The aims of this study is to examine influence of corporate governance mechanism and earnings management on liquidity. Independent variables used in this study is corporate governance and earnings quality. Corporate governance was measured by proportion independent commissioner, composition of audit committee, meetings of audit committee and institutional. Earnings quality was measured by earnings management. Dependent variable in this study is stock liquidity, it was measured by trading volume.

Population in this study is non-financial companies listing in LQ 45 index in 2011-2013. Samples are obtained by purposive sampling method with a total of 90 companies in three years observation. Hypothesis testing method used is multiple regression analysis.

Result of this research indicates is composition of audit committee and earnings management had a significant positive effect to trading volume. Institutional ownership had a significant negative effect to trading volume. Meanwhile, proportion of independent commissioner and meetings of audit committee had not significant effect to trading volume.

Keywords : Independent Commissioners, Meetings of Audit Committee, Composition of Audit Committee, Institutional Ownership, Earnings Management, Trading Volume.

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh mekanisme *corporate governance* dan manajemen laba terhadap likuiditas. Variabel independen dalam penelitian ini adalah *corporate governance* dan kualitas laba. *Corporate governance* diukur dengan proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit dan kepemilikan institusional. Kualitas laba diukur dengan manajemen laba. Variabel dependen penelitian ini adalah likuiditas saham yang diukur dengan volume perdagangan.

Populasi penelitian ini adalah perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam indeks LQ45 tahun 2011-2013. Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan jumlah sampel sebanyak 90 perusahaan selama tiga tahun pengamatan. Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran komite audit dan manajemen laba secara signifikan berpengaruh positif terhadap volume perdagangan. Kepemilikan institusional secara signifikan berpengaruh negatif terhadap volume perdagangan. Sedangkan komisaris independen dan jumlah rapat komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan.

Kata kunci: komisaris independen, jumlah rapat komite audit, komposisi komite audit, kepemilikan institusional, manajemen laba, volume perdagangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas kasih dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “**ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP LIKUIDITAS**”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program sarjana (S1) Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

Skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, petunjuk, bimbingan serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Dr.Suharnomo,S.E.,M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
2. Prof.Dr.H.Muchamad Syafruddin,M.Si.,Akt selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
3. Dul Muid,S.E.,M.Si.,Akt selaku dosen pembimbing yang telah berkenan meluangkan waktu dan dengan penuh kesabaran memberikan bimbingan, saran dan arahan yang sangat bermanfaat dalam penyusunan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Fuad,S.E.T.,M.Si.,Akt.,Ph.D selaku dosen wali yang telah membimbing penulis selama menempuh studi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
5. Seluruh dosen dan staf pengajar Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro, atas segala pengetahuan dan wawasan yang bermanfaat bagi penulis.
6. Tuhan Yesus Kristus yang telah memberikan hikmat dan kemampuan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini, terima kasih atas segalanya yang telah dikaruniakan dalam hidup ini.

7. Orangtuaku yang tercinta, W.Djoko Prasetyo dan Maduretno Widowati yang senantiasa memberikan kasih sayang dan dukungan yang luar biasa, terima kasih atas segala pengorbanan dan kepercayaan yang telah diberikan.
8. Kakakku tersayang, Wika Septian Prasetyo dan adikku tersayang, Sepvia Wida Setyamurti yang senantiasa mengasihi selama ini.
9. Kekasihku tercinta, Aditya Rangga Fergiawan yang senantiasa sabar dan setia dalam mendampingi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini , terima kasih atas dukungan dan perhatian selama ini.
10. Sahabat-sahabat Rokris, Rossy, Irvana, Bagus dan Brigitta yang telah memberikan dukungan dan kenangan yang indah selama ini.
11. Sahabat-sahabatku terkasih, Kristantina Wahyu Prasiwi, Septiayu Murdiono, Ema Sekar, Mindo Yumanda Siboro yang telah memberikan dukungan dan semangat luar biasa selama ini.
12. Teman belajarku, Erpan Febrian dan Intan Bias Papeke yang senantiasa meluangkan waktu untuk *sharing* dalam menyelesaikan segala kesulitan dalam perkuliahan.
13. *Miss Cupid*, Eva Carolina Pardede yang senantiasa memberikan dukungan dan semangat setiap menghadapi permasalahan.
14. Teman-teman seperjuanganku, Titis, Wiwin, Iu, Alfian, Fella, Aulia, Alfa, Omes terima kasih atas hari-hari yang indah selama perkuliahan.
15. Keluarga KKN Desa Gemawang, Balqis, Nurhay, Kinta, Ima, Lintang, Candra, Yuyun, Reja, Julpi, Mas Cun dan Arif, Keluarga Mbah Juli yang telah memberikan kenangan yang indah selama ini.
16. Teman-teman Jurusan Akuntansi angkatan 2011, terima kasih atas kebersamaan yang indah selama menjalani perkuliahan di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.

17. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dukungan

Penulis menyadari bahwa dalam penelitian skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan karena kendala keterbatasan pengetahuan dan pengalaman serta sumber referensi penelitian. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bermanfaat untuk penyusunan penelitian yang lebih baik di masa mendatang. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Semarang, 18 Februari 2015

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN UJIAN	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
ABSTRAK.....	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR GAMBAR.....	xv
DAFTAR GRAFIK.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Rumusan Masalah.....	6
1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian	8
1.4. Sistematika Penelitian.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Landasan Teori	11
2.1.1. Teori Agensi.....	11
2.1.2. Tata Kelola Perusahaan (<i>Corporate Governance</i>).....	12
2.1.2.1. Komisaris Independen	17
2.1.2.2. Komite Audit	20
2.1.2.2.1. Ukuran Komite Audit	20
2.1.2.2.2. Jumlah Rapat Komite Audit.....	22
2.1.2.3. Kepemilikan Institusional	24
2.1.3. Kualitas Laba	25
2.1.3.1. Manajemen Laba.....	26

2.1.4. Likuiditas	30
2.2. Penelitian Terdahulu	32
2.3. Kerangka Pemikiran	36
2.4. Pengembangan Hipotesis	37
2.4.1. Corporate Governance dan Likuiditas	37
2.4.1.1. Komisaris Independen dan Likuiditas	38
2.4.1.2. Ukuran Komite Audit dan Likuiditas	40
2.4.1.3. Jumlah Rapat Komite Audit dan Likuiditas	41
2.4.1.4. Kepemilikan Institusional dan Likuiditas	41
2.4.2. Manajemen Laba dan Likuiditas	43
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	45
3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional	45
3.1.1. Variabel Dependen	45
3.1.2. Variabel Independen	45
3.1.2.1. <i>Corporate Governance</i>	46
3.1.2.1.1. Proporsi Komisaris Independen	46
3.1.2.1.2. Ukuran Komite Audit	47
3.1.2.1.3. Jumlah Rapat Komite Audit	47
3.1.2.1.4. Kepemilikan Institusional	48
3.1.2.2. Manajemen Laba	49
3.1.3. Variabel Kontrol	50
3.2. Populasi dan Sampel	51
3.2.1. Populasi	52
3.2.2. Sampel	52
3.3. Jenis dan Sumber Data	53
3.4. Metode Pengumpulan Data	54
3.5. Analisis Data	54
3.5.1. Statistik Deskriptif	55
3.5.2. Uji Asumsi Klasik	55
3.5.2.1. Uji Normalitas	55
3.5.2.2. Uji Multikolinearitas	56
3.5.2.3. Uji Autokorelasi	56
3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas	57

3.5.3. Analisis Regresi Linear Berganda	57
3.5.4. Uji Hipotesis	58
3.5.4.1. Koefisien Determinasi (R^2).....	58
3.5.4.2. Uji Statistik F	59
3.5.4.3. Uji Statistik t	59
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1. Deskripsi Objek Penelitian	60
4.2. Analisis Data.....	61
4.2.1. Statistik Deskriptif	61
4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	63
4.2.2.1. Uji Normalitas.....	64
4.2.2.2. Uji Multikolinearitas	67
4.2.2.3. Uji Autokorelasi.....	69
4.2.2.4. Uji Heteroskedastisitas.....	70
4.2.3. Analisis Regresi Linear Berganda	72
4.2.4. Pengujian Hipotesis	73
4.2.4.1. Koefisien Determinasi (R^2).....	73
4.2.4.2. Uji Statistik F	74
4.2.4.3. Uji Statistik t	75
4.2.5. Hasil Pengujian Hipotesis	77
4.3. Interpretasi Hasil Penelitian	79
4.3.1. Pengaruh Proporsi Komisaris Independent terhadap Likuiditas.....	79
4.3.2. Pengaruh Ukuran Komite Audit terhadap Likuiditas	80
4.3.3. Pengaruh Jumlah Rapat Komite Audit terhadap Likuiditas	81
4.3.4. Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Likuiditas	82
4.3.5. Pengaruh Manajemen Laba terhadap Likuiditas.....	83
BAB V PENUTUP	84
5.1. Kesimpulan.....	84
5.2. Keterbatasan Penelitian dan Saran.....	86
5.2.1. Keterbatasan Penelitian.....	86
5.2.2. Saran	86
DAFTAR PUSTAKA	87
LAMPIRAN-LAMPIRAN	90

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	34
Tabel 4.1	Prosedur Pemilihan Sampel	60
Tabel 4.2	Statistik Deskriptif	62
Tabel 4.3	Hasil Uji Normalitas dengan <i>Kolmogorov-Smirnov</i> (KS).....	67
Tabel 4.4	Hasil Pengujian Asumsi Multikolinearitas	68
Tabel 4.5	Hasil Pengujian Asumsi Multikolinearitas dengan Matriks Korelasi.....	69
Tabel 4.6	Hasil Pengujian Asumsi Autokorelasi dengan <i>Durbin Watson</i> (DW).....	70
Tabel 4.7	Hasil Pengujian Asumsi Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser.....	73
Tabel 4.8	Hasil Pengujian Regresi Linear Berganda	74
Tabel 4.9	Hasil Pengujian Koefisien Determinasi (R^2)	75
Tabel 4.10	Hasil Uji Statistik F	76
Tabel 4.11	Hasil Uji Statistik t.....	77

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Skema <i>One-Tier Systems</i>	13
Gambar 2.2	Skema <i>Two-Tier Systems</i>	14
Gambar 2.3	Kerangka Pemikiran.....	37

DAFTAR GRAFIK

Grafik4.1	HasilPengujianAsumsiNormalitasdenganAnalisisGrafik Histogram	65
Grafik 4.2	HasilPengujianAsumsiNormalitasdenganAnalisisGrafik Diagonal	66
Grafik 4.3	HasilPengujianHeteroskedastisitasdenganGrafik <i>Scatter Plot</i>	72

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran1	Daftar Perusahaan Sampel	90
Lampiran 2	Hasil Output SPSS	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pada umumnya investor akan menggunakan berbagai pertimbangan yang dapat memberikan keyakinan terhadap keputusan investasinya. Terdapat banyak indikator yang dapat dijadikan dasar bagi investor dalam memperoleh keyakinan akan hal tersebut, salah satunya adalah laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan gambaran yang menunjukkan profil entitas secara lebih dalam sehingga memungkinkan investor untuk mengetahui potensi dan risiko apabila sepakat untuk mengambil keputusan investasi. Selain itu, laporan keuangan juga menunjukkan seberapa baik kinerja dijalankan oleh manajemen dalam mengelola perusahaan. Hal ini menjadi salah satu pertimbangan yang penting karena dijadikan sebagai proksi yang menunjukkan potensi perolehan keuntungan yang akan didapatkan oleh investor di masa mendatang. Apabila manajemen menunjukkan kinerja yang baik, maka akan memberikan kepastian yang lebih besar bagi investor untuk memperoleh bagian keuntungan yang lebih besar. Pada umumnya, kinerja manajemen yang baik diukur secara sederhana melalui perolehan laba yang tercantum di laporan keuangan.

Melihat begitu besar peran laba yang tercantum di laporan keuangan sebagai pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasinya, menjadikan manajemen melakukan berbagai macam cara untuk dapat menunjukkan sejumlah laba tertentu di laporan keuangannya, hal ini dikenal dengan Manajemen Laba (*earning management*). Manajemen memanfaatkan

realita asimetri informasi untuk melakukan manajemen laba. Asimetri informasi merupakan suatu fenomena dimana pihak manajemen memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih privat dibandingkan dengan informasi yang dimiliki oleh investor. Praktik manajemen laba ini tidak sesuai dengan preferensi investor sebagai pemilik modal. Investor (prinsipal) mengharapkan manajemen (agen) mengelola dana yang diinvestasikan secara efektif dan efisien, sehingga entitas yang di kelola dapat terus berlangsung (*going concern*) dan menghasilkan laba yang tercantum di laporan keuangan perusahaan yang sebanding pula dengan kualitas laba secara riil. Sedangkan manajemen mengharapkan kompensasi yang tinggi atas kinerjanya. Praktik manajemen laba dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas laba perusahaan, khususnya bagi para penggunanya dalam membuat keputusan. Laba yang tidak menggambarkan kinerja manajemen sesungguhnya dapat membuat penggunanya tersesat dalam mengambil keputusan.

Terkait dengan konflik keagenan tersebut, indikator lain yang dapat menjadi pertimbangan investor adalah tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Herawaty (2008) menyatakan bahwa konflik keagenan dapat diminimumkan dengan penerapan praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*). Tata kelola perusahaan memberikan suatu gambaran bagi investor mengenai mekanisme pengawasan yang dilakukan terhadap pihak manajemen. Melalui penerapan tata kelola perusahaan yang baik dapat menyelaraskan perbedaan kepentingan yang terjadi antara investor (*principle*) dan manajemen (*agent*). Praktik *corporate governance* menekankan hak pemegang saham untuk memperoleh informasi yang benar, tepat waktu, akurat serta dapat

dipertanggungjawabkan. Perusahaan dapat menjadikan penerapan *corporate governance* sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas kinerja dan nilai perusahaan.

Menurut Bar-Yosef dan Precipe (2013), konflik keagenan pada perusahaan yang menerapkan *one-tier system* tidak hanya terjadi antara investor (prinsipal) dan manajemen (agen) , namun konflik keagenan juga terjadi di antara pemegang saham mayoritas (*blockholder*) dengan investor lainnya. Dalam hal ini, pemegang saham mayoritas (*blockholder*) memungkinkan memiliki informasi yang lebih banyak dan lebih privat mengenai perusahaan dibandingkan dengan investor yang lainnya. Informasi relevan yang dimiliki oleh pemegang saham mayoritas (*blockholder*) tersebut juga akan mempengaruhi apakah investor mayoritas akan tetap mempertahankan investasinya atau sebaliknya. Secara tidak langsung hal tersebut akan berdampak pada likuiditas saham perusahaan di pasar modal. Pada umumnya perusahaan di Indonesia menerapkan *two-tier system*, konflik keagenan yang terjadi lebih kompleks daripada perusahaan yang menerapkan *one-tier system*. Hal ini disebabkan karena pada *two-tier system*, pemegang saham berada di luar manajemen, sekalipun perwakilan pemegang saham dapat menduduki jabatan dalam dewan komisaris. Semakin tingginya asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen, maka semakin berpotensi dalam mempengaruhi likuiditas saham perusahaan di pasar modal.

Penelitian Moh.Nasih (2014) menyatakan bahwa pengungkapan yang diberikan perusahaan kepada publik, khususnya yang berkaitan dengan informasi akuntansi, dapat menurunkan tingkat asimetri informasi di antara pelaku pasar

sehingga pelaku pasar dapat mengambil keputusan investasi secara efektif pada tingkat harga yang wajar dan akhirnya likuiditas saham perusahaan meningkat.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) menyebutkan salah satu tanggung jawab perusahaan terhadap pemegang saham adalah perusahaan harus menyediakan informasi mengenai perusahaan secara tepat waktu, benar dan teratur. Selain itu, perusahaan juga tidak boleh memihak pada pemegang saham tertentu dengan memberikan informasi yang tidak diungkapkan kepada pemegang saham lainnya. Informasi harus diberikan kepada semua pemegang saham tanpa menghiraukan jenis dan klasifikasi saham yang dimilikinya. Nuryaman (2009) menyatakan bahwa pengungkapan informasi oleh manajemen dapat memberikan dorongan positif bagi pertumbuhan ekonomi sebagai dampak dari efisiensi di pasar modal. Pengungkapan informasi tersebut dapat mengurangi terjadinya kesenjangan informasi diantara pelaku pasar modal, dan dapat meyakinkan investor bahwa transaksi terjadi pada harga yang wajar. Kepercayaan investor selanjutnya tercermin dalam peningkatan likuiditas dan penurunan biaya modal.

Selain itu, pada tahun 2015 Indonesia menjadi bagian dari Masyarakat Ekonomi Asean. Terdapat kebutuhan dan dorongan yang kuat untuk meningkatkan praktik-praktik bisnis di Indonesia agar mampu meningkatkan daya saing. Penguatan daya saing tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan praktik tata kelola perusahaan (*corporate governance*) yang bertujuan untuk memacu kinerja finansial dan operasional serta meningkatkan kepercayaan investor,

disamping menyediakan akses modal yang masuk (*Indonesian Corporate Governance Roadmap*).

Penelitian – penelitian yang telah dilakukan sebelumnya berkaitan dengan manajemen laba , tata kelola perusahaan dan likuiditas pasar. Mekanisme tata kelola perusahaan yang lebih baik berpengaruh terhadap likuiditas dengan dua proksi yaitu meningkatkan volume perdagangan dan menurunkan *bid-ask spread* (Bar Yosef dan Annalisa Prencipe,2013). Praktik tata kelola perusahaan berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba (Watfield et al,1995; Gabrielsen et al,1997;Herawaty,2008). Namun perbandingan kontras mengenai hasil penelitian yang dilakukan oleh Darmawati (2004); Bachtiar dan Siregar (2004) yang menunjukkan bahwa tata kelola perusahaan tidak berhubungan dengan manajemen laba. Pada dasarnya dari beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya terjadi inkonsistensi terhadap hasilnya penelitian terkait dengan variabel yang sama. Selain itu, penelitian-penelitian sebelumnya juga memberikan gambaran mengenai hubungan manajemen laba maupun tata kelola perusahaan terhadap likuiditas pasar secara terpisah. Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* dan manajemen laba terhadap likuiditas masih terbatas.

Penelitian Bar-Yosef dan Annalisa Prencipe (2013) yang menjadi acuan bagi penelitian ini mengukur variabel *corporate governance* dengan menggunakan proksi direktur independen dan dualitas CEO. Hal ini di latarbelakangi oleh obyek penelitian yang berada di Italia yang menerapkan *one-tier systems*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis mengambil judul “**Analisis Pengaruh *Corporate Governance* dan Manajemen Laba terhadap Likuiditas**”. Penelitian ini melakukan penyesuaian dengan lingkungan di Indonesia yang menerapkan *two-tiers systems*, oleh sebab itu digunakan proksi komposisi komisaris independen, jumlah komite audit, jumlah rapat komite audit dan kepemilikan institusional sebagai proksi dari *corporate governance*. Objek penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang tercatat dalam indeks LQ 45 tahun 2011-2013. Indeks LQ 45 merupakan indeks yang mencerminkan perusahaan yang memiliki saham likuid di pasar modal.

Penelitian ini merupakan bentuk penelitian modifikasi karena melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada di Indonesia dan didasarkan dari jurnal acuan Bar-Yosef dan Annalisa Prencipe (2013) yang berjudul “*The impact of Corporate Governance and Earnings Management on Stock Market Liquidity in a Highly Concentrated Ownership Capital Market*”.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan observasi yang dilakukan terhadap beberapa penelitian sebelumnya, didapati bahwa terjadi inkonsistensi terhadap hasil penelitian. Penelitian – penelitian sebelumnya juga menggambarkan hubungan antara manajemen laba, tata kelola perusahaan serta likuiditas pasar secara terpisah. Selain itu, penelitian yang memberikan bukti empiris mengenai pengaruh tata kelola perusahaan dan manajemen laba secara bersama terhadap likuiditas pasar masih sangat terbatas dan belum detail (Bar Yosef, 2013). Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan dilakukan pengujian untuk menganalisis apakah terdapat

pengaruh antara manajemen laba dan tata kelola perusahaan secara bersama terhadap likuiditas pasar yang diukur dengan proksi volume perdagangan.

Pertanyaan penelitian tersebut antara lain sebagai berikut :

1. Apakah mekanisme *corporate governance* (yang diproksikan dengan proporsi komisaris independen) berpengaruh positif terhadap likuiditas?
2. Apakah mekanisme *corporate governance* (yang diproksikan dengan ukuran komite audit) berpengaruh positif terhadap likuiditas?
3. Apakah mekanisme *corporate governance* (yang diproksikan dengan jumlah rapat komite audit) berpengaruh positif terhadap likuiditas?
4. Apakah mekanisme *corporate governance* (yang diproksikan dengan kepemilikan institusional) berpengaruh negatif terhadap likuiditas?
5. Apakah praktik manajemen laba berpengaruh positif terhadap likuiditas ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, tujuan penelitian ini meliputi:

1. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh komposisi komisaris independen terhadap likuiditas.
2. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh ukuran komite audit terhadap likuiditas.

3. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh jumlah rapat komite audit terhadap likuiditas.
4. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh kepemilikan institusional terhadap likuiditas.
5. Memperoleh bukti empiris mengenai pengaruh manajemen laba terhadap likuiditas.

1.3.2. Kegunaan Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat bagi semua pihak, antara lain:

1. Bagi Peneliti

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai pengaruh mekanisme *corporate governance* dan manajemen laba terhadap likuiditas, khususnya pada perusahaan non-keuangan yang terdaftar dalam indeks LQ45.

2. Bagi akademisi

Dapat menambah wawasan dan dijadikan sebagai referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

3. Bagi perusahaan

Dapat menambah wawasan mengenai pentingnya penerapan mekanisme *corporate governance* yang baik dalam perusahaan agar dapat menarik investor untuk berinvestasi pada perusahaan tersebut.

4. Bagi investor

Dapat menambah wawasan serta referensi dalam mengambil keputusan investasi.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang disajikan dalam penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai permasalahan pokok yang dibahas serta uraian pembahasan yang lebih terinci di masing-masing bab. Adapun sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 5 (lima) bab, meliputi :

Bab I

Pendahuluan

Bab ini merupakan bagian pertama dalam penelitian ini. Bab ini berisi gambaran umum permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Pendahuluan mencakup hal-hal pokok, meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

Bab II

Landasan Teori

Bab ini berisi tinjauan pustaka tentang teori-teori fundamental dari pokok pembahasan penelitian. Landasan teori mencakup teori agensi, *corporate governance*, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional, manajemen laba serta pengaruhnya terhadap likuiditas. Bab ini juga menyajikan kajian penelitian terdahulu berkaitan dengan pokok pembahasan penelitian serta pengembangan hipotesis.

Bab III

Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan. Bab ini berisi uraian tentang populasi, metode pemilihan sampel, variabel penelitian, definisi operasional, jenis data, sumber data, serta metode analisis data.

Bab IV

Hasil dan Pembahasan

Bab ini menjelaskan tentang temuan empiris yang diperoleh dalam penelitian, analisis serta interpretasi data hasil pengujian serta pembahasan terhadap hipotesis yang telah diajukan.

Bab V

Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian serta saran bagi penelitian yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori dan Penelitian Terdahulu

2.1.1. Teori Agensi

Teori Agensi merupakan teori yang mengemukakan terjadinya konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Pemegang saham menginginkan harga saham perusahaan selalu meningkat yang mencerminkan peningkatan kesejahteraan yang mungkin didapatkan dengan cara menuntut manajemen untuk menghasilkan laba yang tinggi. Sedangkan agen menginginkan untuk mendapatkan kompensasi yang tinggi atas kinerjanya. Keduanya selalu berusaha untuk menguntungkan diri sendiri atas beban pihak lainnya. Konflik kepentingan dalam teori agensi tersebut disebabkan karena terdapat asimetri informasi, dimana agen sebagai pihak yang dianggap memiliki lebih banyak informasi mengenai perusahaan sangat mungkin untuk melakukan tindakan-tindakan sesuai dengan kepentingannya sekalipun tidak sesuai dengan preferensi investor (*principle*) (Hendriksen,2001:207).

Fenomena asimetri informasi tersebut akan mempengaruhi preferensi investor dalam mengambil keputusan untuk tetap mempertahankan kepemilikannya, atau sebaliknya. Secara tidak langsung, hal tersebut akan mempengaruhi likuiditas saham perusahaan di pasar modal. Pada umumnya, asimetri informasi ini juga dapat menimbulkan kerugian bagi pemegang saham

karena tidak secara langsung mengelola perusahaan. Oleh sebab itu diperlukan pihak eksternal yang dapat menjadi mediator dalam meminimalkan terjadi konflik kepentingan tersebut , seperti komisaris independen.

Penelitian yang dilakukan oleh Heally dan Palepu (2001) menyebutkan sebuah hipotesis yang dikenal dengan *Capital Market Transactions Hypothesis* menerangkan bahwa asimetri informasi yang tinggi dapat meningkatkan biaya modal sehingga berdampak pada turunnya harga saham. Penting bagi manajemen sebagai agen untuk tetap menjaga kepentingan pemegang saham dengan meningkatkan kualitas pengungkapan laporannya sehingga dapat meminimalkan asimetri informasi.

2.1.2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*)

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) merupakan sebuah mekanisme pengendalian yang diterapkan perusahaan untuk meningkatkan kualitas pengungkapan serta akuntabilitas pelaporan perusahaan. Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara investor (*principle*) dan manajemen (*agent*). Pada tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) mengarahkan manajemen untuk bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham serta dapat memberikan derajat kepercayaan yang lebih tinggi kepada pemegang saham (Bar-Yosef,2013).

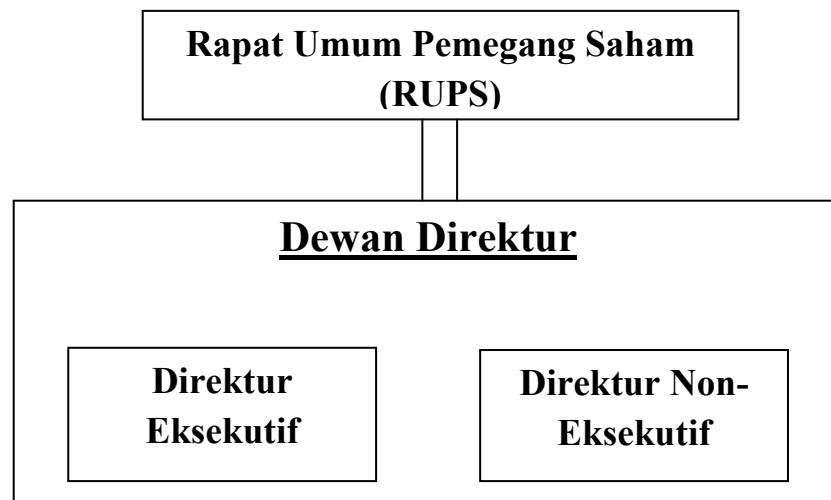
Menurut *Forum for Corporate Governance in Indonesian (FCGI)*, terdapat 2 (dua) jenis struktur perusahaan yang mendasari penerapan praktik *corporate governance* , antara lain *one-tier system* dan *two-tier system*.

1. One-tier systems

One-tier systems atau dikenal juga dengan Sistem Hukum Anglo Saxon. Sistem ini hanya memiliki satu Dewan Direksi (*Board of Director*), yang biasanya terdiri dari manajemen atau pengurus senior sebagai Direktur Eksekutif dan Direktur Independen yang bekerja paruh waktu sebagai Direktur Non-Eksekutif. Dari Dewan Direksi (*Board of Director*) biasanya akan dipilih minimal 2 (dua) orang di antara mereka untuk menjabat sebagai *Chief Executive Officer (CEO)*, *Chief Financial Officer (CFO)*, dan sering juga ditambah 1 (satu) orang untuk menjabat sebagai *Chief Operating Officer (COO)*. Negara yang menganut prinsip *one-tier systems* antara lain Amerika Serikat dan Inggris.

Gambar 2.1

Skema One-Tier System



One-tier systems

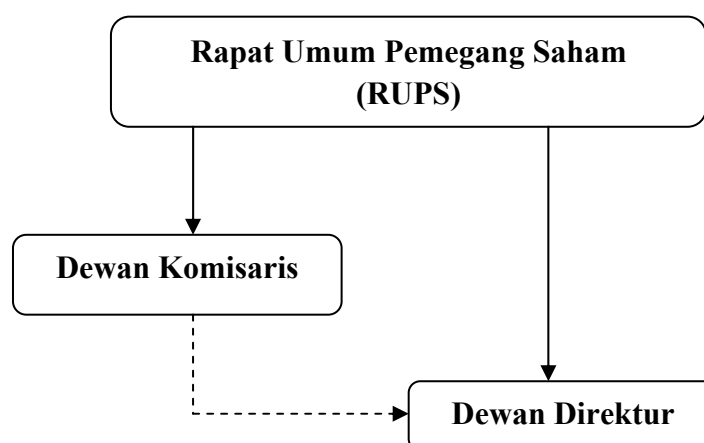
Sumber : FCGI

2. *Two-tier systems*

Struktur yang lain yaitu *two-tier systems* atau juga dikenal dengan Sistem Hukum Kontinental Eropa. Pada struktur *two-tier system*, perusahaan mempunyai 2 (dua) badan yang terpisah yaitu Dewan Komisaris (*Board of Commisioner*) dan Dewan Direktur (*Board of Director*). Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang ketua Dewan Komisaris, dan Dewan Direktur dipimpin oleh seorang Ketua Dewan Direktur. Anggota Dewan Komisaris ditunjuk , diangkat dan di ganti oleh pemegang saham melalui mekanisme Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dewan Komisaris juga tidak diperkenankan untuk terlibat dalam urusan manajemen maupun transaksi-transaksi perusahaan dengan pihak ketiga. Negara yang menganut prinsip *two-tier systems* antara lain Denmark, Belanda, Jerman dan Jepang.

Gambar 2.2

Skema *Two-Tier System*



two-tier systems

Sumber: FCGI

Struktur dewan di Indonesia menganut *two-tier system*, karena sebagian besar sistem hukum di Indonesia merupakan hasil adopsi dari sistem hukum Belanda (LKDI). Selain itu, Undang-Undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas secara tersirat juga menegaskan penerapan *two-tier systems* oleh perusahaan di Indonesia. UU No.40 tahun 2007 juga menegaskan prinsip-prinsip kesetaraan diantara organ-organ dalam perusahaan, seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Dewan Direktur dan organ-organ perusahaan lainnya. Hal ini juga menunjukkan bahwa upaya perbaikan tata kelola perusahaan di Indonesia telah diakomodasi sedemikian rupa dalam bentuk perundang-undangan yang sah (KNKG).

Menurut Lembaga Komisaris dan Direktur Indonesia, pada perusahaan yang menerapkan *one-tier systems*, terjadinya asimetri informasi dapat dilakukan oleh pemegang saham mayoritas bersama-sama dengan manajemen karena mereka berada pada satu kelompok yang sama sebagai pembuat keputusan perusahaan. Dan hal ini dapat merugikan pemegang saham minoritas karena dapat membuat keputusan investasi yang salah dan menimbulkan kerugian investasi. Oleh sebab itu, penerapan *corporate governance* pada *one-tier systems* dilakukan dengan memperbanyak direktur independen (*outsider director*). Sedangkan pada perusahaan yang menerapkan *two-tier systems*, potensi terjadinya asimetri informasi cenderung lebih besar, karena pemegang saham berada di luar manajemen, sekalipun pemegang saham mayoritas dapat dijadikan sebagai dewan

komisaris. Penerapan *corporate governance* dalam *two-tier systems* dapat dilakukan melalui keterlibatan komisaris independen.

Penelitian yang dilakukan Nuryaman (2009) mengemukakan bahwa Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dapat diterapkan melalui 2 (dua) mekanisme yaitu mekanisme secara internal dan mekanisme secara eksternal. Mekanisme secara internal merupakan cara pengendalian yang diterapkan perusahaan melalui elemen-elemen yang ada di dalam perusahaan seperti komposisi dewan komisaris dan komposisi komisaris independen dan keberadaan komite audit. Sedangkan mekanisme secara eksternal merupakan cara pengendalian yang diterapkan perusahaan melalui elemen yang ada di luar perusahaan seperti kualitas audit. Menurut Herawaty (2008) terdapat beberapa manfaat dari penerapan Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*), antara lain : (1) meminimalkan *agency costs* dengan mengontrol konflik kepentingan yang mungkin terjadi antara prinsipal dengan agen; (2) meminimalkan *cost of capital* dengan menciptakan sinyal positif kepada para penyedia modal; (3) meningkatkan citra perusahaan; (4) meningkatkan nilai perusahaan yang dapat dilihat dari *cost of capital* yang rendah, dan (5) peningkatan kinerja keuangan dan persepsi *stakeholder* terhadap masa depan perusahaan yang lebih baik.

Menurut FCGI, terdapat 4 (empat) prinsip utama di dalam penegakkan praktik *corporate governance*, antara lain :

1. *Fairness* (Keadilan), prinsip ini menekankan pemenuhan hak-hak pemegang saham oleh perusahaan tanpa membedakan jenis saham atau jumlah kepemilikan investor dalam perusahaan tersebut.

2. *Transparency* (Transparansi/Keterbukaan), prinsip ini menekankan pada kewajiban bagi perusahaan untuk menyediakan informasi yang terbuka, tepat waktu, jelas serta dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan keadaan keuangan dan pengelolaan perusahaan.
3. *Accountability* (Akuntabilitas), prinsip ini menekankan pada kewajiban dan tanggung jawab perusahaan dalam upaya menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan manajemen melalui pengawasan dewan komisaris.
4. *Responsibility* (Pertanggungjawaban), prinsip ini menekankan kewajiban dalam memastikan perusahaan mematuhi peraturan dan ketentuan yang berlaku.

2.1.2.1. Komisaris Independen

Dewan komisaris memiliki peranan yang penting dalam penegakkan mekanisme *corporate governance*. Dewan Komisaris terdiri atas wakil dari pihak prinsipal, pihak agen serta pihak independen. Dewan komisaris bertanggungjawab untuk menyelaraskan kepentingan antara pemegang saham dan manajer. OECD (2004) menjelaskan tugas-tugas utama dari Dewan Komisaris meliputi :

1. Menilai dan mengarahkan strategi perusahaan, garis besar rencana kerja, kebijakan pengendalian risiko, anggaran tahunan dan rencana usaha; menetapkan sasaran kerja; mengawasi pelaksanaan dan kinerja perusahaan; serta memonitor penggunaan modal perusahaan, investasi dan penjualan aset;

2. Menilai sistem penetapan penggajian pejabat pada posisi kunci dan penggajian anggota Dewan Direksi, serta menjamin suatu proses pencalonan anggota Dewan Direksi yang transparan dan adil;
3. Memonitor dan mengatasi masalah benturan pada tingkat manajemen, anggota Dewan Direksi dan anggota Dewan Komisaris, termasuk penyalahgunaan aset perusahaan dan manipulasi transaksi perusahaan;
4. Memonitor pelaksanaan *Governance*, dan mengadakan perubahan dimana yang perlu;
5. Memantau proses keterbukaan dan efektivitas komunikasi dalam perusahaan.

Secara garis besar, dewan komisaris memiliki wewenang untuk mengawasi serta memberikan petunjuk dan arahan mengenai pengelolaan perusahaan. Melalui wewenang tersebut, dewan komisaris memiliki pengaruh yang kuat untuk meningkatkan luasnya pengungkapan informasi yang diberikan oleh manajemen kepada pemegang saham. Dengan meningkatnya pengungkapan informasi, dapat memberikan dampak yang positif bagi pemegang saham dalam melakukan pertimbangan untuk pengambilan keputusan.

UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan terbatas menyatakan bahwa Dewan Komisaris ditunjuk dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam pembentukan Dewan Komisaris, RUPS juga mempertimbangkan faktor independensi. Hal tersebut ditunjukkan dengan salah

satu indikator yang mempersyaratkan keterlibatan pihak independen di dalam pelaksanaan Dewan Komisaris. Pihak independen tersebut dikenal dengan komisaris eksternal atau komisaris independen.

KNKG (2006) menyatakan bahwa komisaris independen adalah komisaris yang tidak berasal dari pihak yang terafiliasi. Yang dimaksud terafiliasi adalah pihak yang memiliki hubungan bisnis atau kekerabatan dengan pemegang saham pengendali, Dewan Direksi, Dewan Komisaris maupun pihak-pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Surat Keputusan BAPEPAM Nomor:Kep-643/BL/2012 yang tertuang dalam peraturan Nomor IX.I.5 menguraikan kriteria yang harus dipenuhi oleh komisaris independen, meliputi:

1. Bukan merupakan orang yang bekerja atau memiliki wewenang serta tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan atau mengawasi kegiatan entitas dalam waktu minimal 6 (enam) bulan terakhir.
2. Tidak memiliki saham pada entitas tersebut.
3. Tidak memiliki hubungan afiliasi.
4. Tidak memiliki hubungan usaha yang berkaitan dengan entitas.
5. Salah satu komisaris independen memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan.

Menurut KNKG (2006), keterlibatan komisaris independen diharapkan dapat menjamin mekanisme pengawasan agar berjalan efektif dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan mengutamakan independensi dalam kriteria yang dipersyaratkan, komisaris independen dapat meningkatkan

integritas Dewan Komisaris dalam melakukan tanggung jawabnya. Selain itu dalam pemilihan komisaris independen, pemegang saham minoritas dimungkinkan untuk memberikan usulan yang dapat disampaikan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris yang didukung oleh komisaris independen di dalamnya, memiliki wewenang serta peran sentral untuk dapat melindungi kepentingan pemegang saham dan manajemen yang ditunjukkan melalui transparansi informasi berkaitan dengan kinerja perusahaan. Dewan Komisaris juga melakukan pertanggungjawaban dari pelaksanaan pengawasan pengelolaan perusahaan oleh direksi dalam bentuk laporan. Dengan demikian, pemegang saham dapat mengetahui setiap perkembangan pengelolaan perusahaan secara lebih transparan.

2.1.2.2. Komite Audit

2.1.2.2.1. Ukuran Komite Audit

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris dapat membentuk komite. Komite tersebut bertugas untuk memberikan usulan kepada Dewan Komisaris untuk pembuatan keputusan dalam rangka perbaikan pengelolaan perusahaan. Salah satu komite yang wajib dibentuk oleh Dewan Komisaris adalah Komite Audit. Hal tersebut didasarkan pada Surat Keputusan BAPEPAM Nomor:Kep-643/BL/2012 mengenai pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit yaitu pada peraturan Nomor IX.I.5 yang menyatakan bahwa setiap emiten diwajibkan untuk membentuk Komite Audit.

Menurut FCGI (2005) Komite Audit bertugas untuk memberikan usulan atau pandangan kepada Dewan Komisaris berkaitan tentang akuntansi, laporan keuangan dan penjelasannya, sistem pengawasan internal dan auditor independen. Komite Audit beranggotakan minimal 3 (tiga) orang, dimana salah satu diantaranya merupakan seorang Komisaris Independen. Hal ini dimaksudkan agar dapat membantu Dewan Komisaris untuk menjalankan tanggung jawabnya khususnya yang berkaitan dengan kebijakan akuntansi, pengawasan internal, serta sistem pelaporan keuangan.

Bapepam dalam peraturan No.IX.I.5 juga mempersyaratkan kriteria yang harus dipenuhi untuk menjadi anggota Komite Audit, antara lain :

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan serta pengalaman yang mendukung kinerjanya sebagai Komite Audit;
2. Minimal salah satu diantara anggota Komite Audit memiliki latar belakang akuntansi atau keuangan;
3. Tidak menjadi bagian dari Kantor pemberi jasa keuangan atau hukum yang bekerja untuk perusahaan tersebut dalam jangka waktu minimal 6 bulan terakhir;
4. Bukan merupakan pihak yang memiliki hubungan dengan perusahaan baik yang terafiliasi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat mengganggu independensinya; serta
5. Tidak memiliki kepemilikan saham di perusahaan tersebut.

Secara garis besar, Komite Audit memiliki tanggung jawab di 3 (tiga) bidang, meliputi:

a. Laporan Keuangan

Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang dibuat oleh manajemen menggambarkan informasi yang sebenarnya.

b. Tata kelola Perusahaan

Komite Audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengelolaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mendukung perusahaan menjunjung tinggi etika usaha, serta melaksanakan pengawasan yang efektif untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan maupun meminimalkan terjadinya kecurangan.

c. Pengawasan Perusahaan

Komite Audit bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan termasuk segala bentuk risiko yang berpotensi dapat mengganggu sistem pengendalian internal perusahaan.

Melihat begitu besar ruang lingkup wewenang yang dimilikinya dalam pelaksanaan mekanisme *corporate governance*, Komite Audit diharapkan dapat meningkatkan keakuratan pengungkapan informasi serta peningkatan pengawasan dalam pengelolaan perusahaan.

2.1.2.2.2. Jumlah Rapat Komite Audit

Koordinasi pelaksanaan tugas Komite Audit diwujudkan dalam bentuk rapat terpisah maupun gabungan dengan Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Rapat yang direncanakan dengan baik dan bahan yang dipersiapkan

dengan lengkap dapat memberikan hasil rapat yang optimal. Dari hasil rapat tersebut, selanjutnya dapat digunakan sebagai usulan dalam pertimbangan pembuatan keputusan. Bapepam dalam peraturan No.IX.I.5 menguraikan hal-hal yang berkaitan dengan rapat Komite Audit, meliputi:

1. Komite Audit diwajibkan untuk mengadakan sejumlah rapat minimal sama dengan rapat Dewan Komisaris yang telah ditetapkan dalam Anggaran Dasar;
2. Rapat Komite Audit dapat terlaksana apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota Komite Audit;
3. Keputusan Komite Audit diambil dengan musyawarah mufakat;
4. Hasil rapat Komite Audit ditandatangani oleh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

Dengan persyaratan yang telah diuraikan secara rinci tersebut memberikan gambaran yang jelas mengenai besarnya pengaruh Komite Audit di dalam penegakkan mekanisme *corporate governance*. Komite Audit menjadi pihak yang secara langsung melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan perusahaan sehingga memiliki informasi yang lebih aktual tentang mekanisme yang berjalan diterapkan perusahaan. Semakin banyak informasi yang dikoordinasikan melalui Rapat Komite Audit diharapkan dapat meningkatkan kualitas usulan atau keputusan yang dihasilkan. Yang pada akhirnya, hal tersebut dapat berdampak positif bagi perbaikan tata kelola perusahaan.

2.1.2.3. Kepemilikan Institusional

Mekanisme *corporate governance* berkaitan erat dengan masalah transparansi dan akuntabilitas sehingga pengungkapan mengenai kepemilikan perusahaan menjadi hal yang penting. Pengungkapan kepemilikan perusahaan dilandasi oleh perlindungan kebutuhan informasi terhadap pemegang saham non-pengendali yang tidak mengetahui aktivitas perusahaan secara aktual. Pada umumnya pengungkapan kepemilikan perusahaan tersaji di dalam struktur kepemilikan perusahaan. Sebagaimana yang telah dipersyaratkan oleh UU No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mewajibkan entitas untuk memiliki daftar pemegang saham serta klasifikasi jumlah saham yang dimiliki. Selain itu ketentuan yang terdapat dalam pasar modal menyatakan bahwa kepemilikan saham sebesar 5 persen atau lebih; dan kepemilikan Dewan Direksi atau Dewan Komisaris wajib untuk diungkapkan dalam laporan keuangan tahunan perusahaan.

Penelitian-penelitian terdahulu mengenai mekanisme *corporate governance* membagi struktur kepemilikan menjadi 2 (dua), yaitu kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Penelitian ini berfokus pada kepemilikan institusional karena kepemilikan institusional dapat mewakili pemegang saham non-pengendali yang memiliki peranan dalam likuiditas atas keputusan investasi yang diambilnya.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan sejumlah saham perusahaan oleh institusi tertentu. Menurut Herawaty (2008), pemegang saham institusional disebut dengan pemegang saham *shopisticated* , artinya pemegang

saham institusional merupakan pemegang saham yang tidak mudah untuk dibodohi karena memiliki kemampuan dalam menganalisis informasi serta memprediksi laba dimasa mendatang dibandingkan pemegang saham non institusional. Kepemilikan institusional memiliki peranan penting dalam penegakkan mekanisme *corporate governance*. Peran ini diperoleh karena pada umumnya lembaga melakukan investasi dengan jumlah kepemilikan yang cukup tinggi. Seiring dengan jumlah kepemilikan yang tinggi tersebut, investor institusional dapat memiliki pengaruh dalam mekanisme pengawasan perusahaan. Melalui mekanisme pengawasan yang ketat oleh investor institusional maka dapat meminimalisir tindakan manajemen laba yang dapat merugikan pemegang saham serta dapat memberikan kepercayaan pada pemegang saham bahwa dana yang telah diinvestasikan dikelola dengan baik.

2.1.3. Kualitas Laba

Menurut Bar-Yosef dan Prencipe (2013), bila dilihat dari perspektif akuntansi, pengungkapan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap perusahaan dapat mengurangi masalah asimetri informasi. Tingkat pengungkapan yang tinggi dapat menurunkan biaya modal investor untuk memperoleh informasi privat mengenai perusahaan.

Bagi analis sekuritas, laporan keuangan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat digunakan sebagai sumber informasi untuk mengevaluasi kinerja perusahaan. Salah satu ukuran yang paling relevan untuk menilai kinerja perusahaan dan paling sering dianalisis adalah laba. Namun, seringkali tidak mudah untuk menganalisis laba perusahaan dari tahun ke tahun atau

membandingkan laba perusahaan satu dengan yang lain. Hal ini disebabkan karena manajemen memiliki kesempatan untuk memilih metode dan kebijakan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan. Sehingga memerlukan analisis lebih lanjut untuk menilai kualitas laba perusahaan. Semakin tinggi kualitas laba yang dilaporkan perusahaan, semakin mencerminkan laba secara riil yang mampu dihasilkan oleh perusahaan, begitu pula sebaliknya.

2.1.3.1. Manajemen Laba (*Earning Management*)

Menurut Heally dan Wahlen (2000) dalam Bar-Yosef dan Prencipe (2013) dan Herawaty (2008) menyebutkan bahwa Manajemen Laba (*Earning Management*) merupakan suatu fenomena ketika manajemen menggunakan wewenangnya untuk mengubah angka-angka dalam laporan keuangan yang dapat menyesatkan pihak-pihak lain yang berkepentingan. Pihak manajemen memiliki wewenang untuk memilih opsi dari aturan-aturan yang akan diterapkan dalam perlakuan akuntansi. Melalui wewenang tersebut memberikan keleluasaan bagi manajemen untuk mengelola laba perusahaan yang tercantum dalam laporan keuangan sesuai dengan kepentingannya yaitu memperoleh insentif dari hasil kinerjanya yang diukur dari besarnya laba yang dicapai. Praktik manajemen laba memiliki kaitan yang erat dengan motivasi-motivasi pihak manajemen dalam memenuhi sasaran yang ingin dicapai maupun penggunaan *judgment* dalam penyusunan laporan keuangan. Tingkat praktik manajemen laba dalam perusahaan mencerminkan seberapa baik kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat manajemen laba akan meningkatkan asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen. Pada akhirnya hal ini dapat menurunkan

reliabilitas kualitas laba yang dilaporkan perusahaan, begitu pula sebaliknya. Menurut Kusuma (2006), terdapat dua motivasi utama yang melatarbelakangi terjadinya praktik manajemen laba yang dilakukan oleh manajer:

1. Tujuan oportunistis

Tujuan oportunistis yang melatarbelakangi para manajer dalam melakukan praktik manajemen laba merupakan salah satu bentuk sikap curang yang diimplementasikan dalam laporan keuangan. Pada umumnya, para manajer berusaha mengambil keputusan tertentu agar dapat melaporkan kinerja yang dapat menguntungkan mereka. Tujuan oportunistis tentunya dapat merugikan pemakai laporan keuangan karena informasi yang disampaikan manajemen menjadi tidak relevan dan tidak menggambarkan kondisi perusahaan yang sebenarnya.

2. Tujuan informatif (*signaling*)

Tujuan informatif memungkinkan para manajer untuk melaporkan kesempatan-kesempatan yang dianggap prospektif bagi perusahaan di masa mendatang. Manajer sebagai pihak yang berhubungan secara langsung dengan aktivitas operasional perusahaan dianggap mengetahui informasi yang relevan dengan kesempatan tersebut dapat melaporkannya kepada pemegang saham serta mengestimasi prospek laba yang mungkin didapatkan. Tujuan informatif (*signaling*) dapat memberikan dampak yang positif bagi pemegang saham karena dapat menambah relevansi informasi dalam membuat keputusan.

M.Omid (2012) menyatakan bahwa dalam beberapa penelitian menunjukkan bahwa praktik manajemen laba yang diukur melalui proksi *discretionary accrual* dapat memberikan dampak positif dan signifikan terhadap profitabilitas perusahaan dimasa mendatang. Hal ini sesuai dengan tujuan informatif (*signaling*) yang dapat memberikan dampak positif bagi pemegang saham sebagai pembuat keputusan. Namun disisi lain, sebagian besar penelitian terdahulu menemukan konsistensi timbulnya motivasi oportunistik dalam praktik manajemen laba, dimana para manajer memiliki ketakutan untuk melaporkan kerugian atau penurunan laba. Hal ini yang melatarbelakangi banyak penelitian yang menyatakan bahwa praktik manajemen laba memberikan dampak yang negatif terhadap pengungkapan kepada pemegang saham. Kecenderungan penelitian-penelitian terdahulu mengenai manajemen laba berfokus pada motivasi oportunistik oleh para manajer yang berpotensi merugikan pemegang saham berkaitan dengan relevansi informasi yang disampaikan. Tinggi rendahnya tingkat manajemen laba dalam sebuah entitas tentunya dapat berdampak pada besarnya pengungkapan informasi yang ditujukan kepada pemegang saham. Praktik manajemen laba dapat meningkatkan asimetri informasi khususnya bagi pihak luar yang berkepentingan. Pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan biasanya menggunakan laporan keuangan, sehingga praktik manajemen laba tersebut dapat memberikan informasi yang tidak relevan bagi pengambilan keputusan. Penelitian Rahman dan Hutagaol (2008)

menyebutkan praktik manajemen laba dapat dibedakan menjadi 2 jenis, antara lain :

a. Manajemen Laba Riil merupakan praktik manajemen laba yang dilakukan dengan tujuan untuk pencapaian target laba dan menghindari pelaporan terjadinya kerugian dalam aktivitas operasional perusahaan.

Pencapaian target laba dapat dilakukan dengan cara :

a. Manipulasi Penjualan

Manipulasi Penjualan merupakan salah satu upaya manajemen laba riil yang bertujuan meningkatkan penjualan pada periode waktu tertentu sehingga memberikan kesan bahwa pencapaian target penjualan dan laba dapat terpenuhi. Pada umumnya, praktik manipulasi penjualan ini dilakukan dengan memberikan diskon penjualan yang lebih besar maupun dengan memberikan kemudahan kredit penjualan. Praktik ini dapat memberikan dampak pada penurunan aliran kas perusahaan.

b. Pengurangan beban-beban diskresionari

Manajemen dapat memainkan angka-angka dalam laporan keuangan khususnya yang berkaitan dengan laba. Salah satu cara yang mungkin untuk dilakukan adalah dengan meminimalkan beban-beban yang tidak secara langsung berkaitan dengan produksi barang/jasa. Hal ini dimaksudkan untuk mencantumkan beban dengan jumlah yang minimal sehingga di dapatkan laba yang cenderung lebih besar. Pada umumnya, efisiensi merupakan wajar dilakukan dalam melakukan bisnis. Namun,

apabila hal tersebut dilakukan secara berlebihan maka dapat mengganggu kelangsungan hidup perusahaan di masa mendatang.

c. Produksi yang berlebihan (*Overproduction*)

Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk menekan harga barang yang akan dijual adalah dengan pencapaian skala ekonomi. Hal ini pula yang dijadikan alternatif bagi manajemen didalam praktik manajemen laba. Manajemen berupaya meningkatkan penjualan dengan menawarkan harga yang rendah. Untuk menekan harga jual tersebut, manajemen memproduksi barang dengan jumlah yang berlebihan, dan diharapkan dapat meningkatkan penjualan serta laba perusahaan.

b. Manajemen Laba Akrual

Bentuk lain dari praktik manajemen laba yang mungkin dilakukan oleh manajemen adalah melalui proses akrual, dimana laporan keuangan di hasilkan. Angka-angka dalam laporan keuangan mengandung komponen akrual, baik diskresioner maupun non-diskresioner.

2.1.4. Likuiditas

Likuiditas adalah kemampuan perusahaan untuk mengubah assetnya menjadi kas (Hendriksen, 2001:272). Menurut Moh. Nasih (2014) apabila sebuah aset dapat dilikuidasi dengan cepat dan tidak mengalami penurunan harga yang signifikan maka aset tersebut dianggap memiliki tingkat likuiditas yang tinggi. Begitu pula suatu saham dikatakan memiliki tingkat likuiditas yang tinggi apabila dapat dijual secara cepat sesuai dengan nilai wajarnya. Likuiditas pada pasar

finansial merupakan seberapa mudah dan cepat aset finansial untuk dibeli/dijual sesuai dengan nilai wajarnya.

Kyle (1985) dalam Bar-Yosef dan Prencipe (2013) dan Harris (1991) dalam Moh.Nasih (2014) membagi likuiditas ke dalam 3 (tiga) dimensi, yaitu kerapatan (*tightness*), kedalaman (*depth*) dan resiliensi (*resiliency*). Kerapatan (*tightness*) mengacu pada selisih antara harga transaksi dengan harga efisien yaitu harga yang seharusnya terjadi pada titik ekuilibrium. Kedalaman (*depth*) mengacu pada jumlah saham yang dibeli pada harga tertentu. Resiliensi (*resiliency*) mengacu pada kecepatan sebuah saham untuk kembali ke harga efisiennya.

Dari pengembangan teori tersebut, penelitian Bar-Yosef dan Prencipe (2013) merekomendasikan cara pengukuran likuiditas dengan menggunakan *bid ask-spread* (B_As) dan volume perdagangan. *Bid-ask spread* (B_As) merupakan salah satu metode pengukuran likuiditas yang sesuai dengan dimensi kerapatan (*tightness*). Literatur sebelumnya mengenai *bid-ask spread* (B_As) menyatakan bahwa terdapat 3 (tiga) komponen biaya yang harus ditanggung oleh *dealer* ketika bertransaksi dengan *informed trader*, antara lain : (1) biaya pemrosesan pesanan (*order processing cost*) adalah biaya yang ditanggung oleh *dealer* dalam mempertemukan kesiapan pembelian dan penjualan serta kompensasi bagi *dealer* dalam menyelesaikan transaksi, (2) biaya penyimpanan persediaan (*inventory holding cost*) adalah biaya yang ditanggung oleh *dealer* untuk menyimpan sejumlah saham yang akan dijual ketika terdapat permintaan, dan (3) *adverse selection component* adalah harga yang diberikan pedagang sekuritas kepada *informed trader*. Dari keriga komponen biaya tersebut, penelitian ini akan

berfokus pada komponen biaya yang ketiga yaitu *adverse selection component* karena mencerminkan arus informasi yang ada di pasar modal.

Volume perdagangan merupakan proksi pengukuran yang didasarkan pada konsep kedalaman (*depth*) dari likuiditas. Menurut Bar-Yosef dan Prencipe (2013), volume perdagangan dari likuiditas mencerminkan keinginan sejumlah investor untuk membeli dan keinginan sejumlah investor lain untuk menjual, dan hal tersebut menggambarkan asimetri informasi yang terjadi diantara kedua pihak.

Penelitian ini hanya menggunakan satu dimensi likuiditas yaitu dimensi kedalaman yang tercermin melalui pengukuran volume perdagangan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan data yang tersedia di Indonesia yang tidak memungkinkan untuk menggunakan dua dimensi lainnya yaitu dimensi kerapatan yang tercermin melalui pengukuran *bid_ask spread* dan dimensi resiliensi.

2.2. Penelitian Terdahulu

Penelitian tentang pengaruh mekanisme corporate governance dan manajemen laba terhadap likuiditas belum banyak dilakukan. Beberapa penelitian empiris sebelumnya berfokus terhadap masing-masing variabel *corporate governance*, manajemen laba dan likuiditas sebagai variabel yang terpisah.

Penelitian Bar-Yosef dan Prencipe (2013) sebagai acuan dari penelitian ini, menguji pengaruh *corporate governance* dan manajemen laba terhadap likuiditas. Obyek penelitian yang berada Italia dengan penerapan *one-tier systems* melatarbelakangi pengukuran *corporate governance* dengan proksi proporsi direktur independen dan dualitas CEO. Sedangkan variabel manajemen laba diukur dengan menggunakan *Abnormal Working Capital Accrual (AWCA)*.

Variabel likuiditas sebagai variabel dependen diukur dengan menggunakan 2(dua) proksi, yaitu *bid_ask spread* dan volume perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* dan manajemen laba berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan, sedangkan proksi *bid-ask spread* hanya dipengaruhi oleh mekanisme *corporate governance*.

Yushita, dkk (2013) menguji pengaruh mekanisme *corporate governance*, kualitas auditor eksternal dan likuiditas terhadap kualitas laba. Variabel *corporate governance* diukur dengan struktur dewan direksi, komisaris independen, komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial. Sedangkan variabel kualitas laba diukur dengan *discretionary accrual*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa struktur dewan direksi dan komisaris independen secara signifikan berpengaruh terhadap *discretionary accrual*, kualitas auditor eksternal secara signifikan berpengaruh negatif terhadap *discretionary accrual*. Sedangkan komite audit, kepemilikan institusional dan kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap *discretionary accrual*.

Penelitian Herawaty (2008) menguji pengaruh *earnings management* terhadap nilai perusahaan dengan *corporate governance* sebagai variabel moderating. Mekanisme *corporate governance* diukur dengan komisaris independen, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan kualitas audit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *earnings management* secara signifikan berpengaruh terhadap nilai perusahaan dengan komisaris independen dan kualitas audit sebagai variabel pemoderasi.

Penelitian Nuryaman (2009) menguji pengaruh konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan dan mekanisme *corporate governance* terhadap pengungkapan sukarela. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen yang merupakan proksi dari *corporate governance* tidak berpengaruh terhadap pengungkapan sukarela.

Penelitian Moh.Nasih (2014) menguji pengaruh kualitas laba terhadap likuiditas saham. Kualitas laba diukur dengan *discretionary accrual* dan *income smoothing*. Sedangkan likuiditas saham diukur dengan *bid_ask spread*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas laba secara signifikan berpengaruh positif terhadap likuiditas saham.

Tabel 2.1

Ringkasan Penelitian Terdahulu

Peneliti	Tahun	Judul	Variabel	Hasil
Bar Yosef dan Annalisa Prencipe	2013	<i>The impact of corporate governance and earning management on stock market liquidity in a highly concentrated ownership capital market.</i>	<i>Corporate governance, earnings management,</i> likuiditas	<i>Corporate governance</i> berpengaruh signifikan terhadap B_As dan Volume Perdagangan sebagai proksi dari likuiditas, sedangkan <i>Earnings Management</i> berpengaruh signifikan terhadap Volume Perdagangan namun tidak berpengaruh

				signifikan terhadap <i>Bid_Ask Spread</i>
Amanita Yovi Yushita,dkk	2013	Pengaruh mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Kualitas Auditor Eksternal dan Likuiditas terhadap Kualitas Laba	<i>Corporate Governance</i> , Kualitas Auditor Eksternal, Likuiditas, Kualitas Laba	Struktur dewan direksi, komisaris independen berpengaruh positif dan signifikan terhadap <i>discretionary accrual</i> . Kualitas auditor eksternal berpengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>discretionary accrual</i> . Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komite audit dan likuiditas tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laba.
Vinola Herawaty	2008	Peran Praktek <i>Corporate Governance</i> Sebagai <i>Moderating Variable</i> dari Pengaruh <i>Earnings Management</i> Terhadap Nilai Perusahaan	<i>Corporate Governance, Earnings Managements</i> , kepemilikan institusional, komisaris independen, kualitas audit.	<i>Corporate Governance</i> berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan dengan variabel komisaris independen dan kepemilikan institusional.
Nuryaman	2009	Pengaruh Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran	Konsentrasi kepemilikan, ukuran perusahaan, <i>corporate governance</i> ,	Konsentrasi Kepemilikan, Ukuran Perusahaan dan

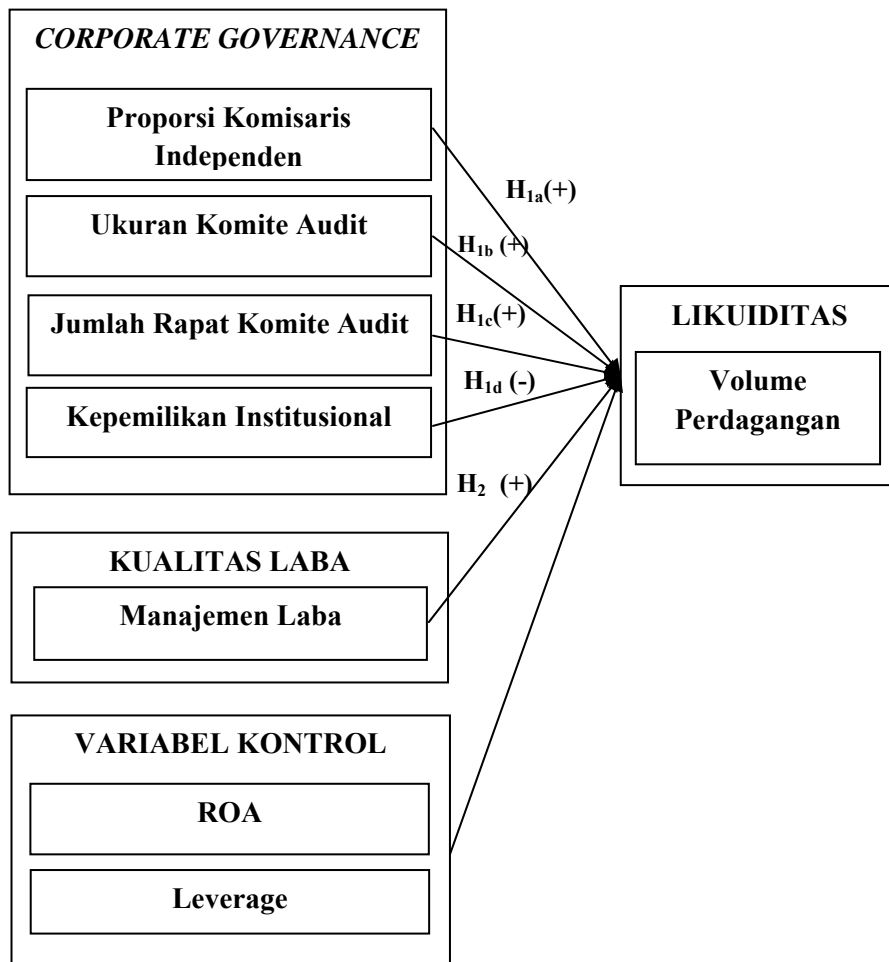
		Perusahaan, Mekanisme <i>Corporate Governance</i> terhadap pengungkapan sukarela.	pengungkapan sukarela.	Kualitas Audit berpengaruh positif terhadap pengungkapan sukarela, sedangkan komposisi dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengungkapan Sukarela.
Moh. Nasih	2014	Kualitas Laba dan Likuiditas Saham : Studi di Bursa Efek Indonesia	<i>Bid-ask spread, discretionary accrual, earnings smoothing,</i> kualitas laba, likuiditas saham	Kualitas Laba berpengaruh positif terhadap likuiditas saham

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual berdasarkan uraian landasan teori diatas dapat digambarkan dalam skema penelitian sebagai berikut:

Gambar 2.3

Kerangka Pemikiran



2.4. Pengembangan Hipotesis

2.4.1. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*) dan Likuiditas

Tata kelola perusahaan (*Corporate Governance*) merupakan salah satu bentuk upaya untuk meminimalkan terjadinya konflik kepentingan yang seringkali terjadi di dalam pengelolaan sebuah perusahaan. Menurut FCGI, prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) meliputi *fairness*, *transparency*, *accountability* dan *responsibility*. Prinsip-prinsip tersebut

menekankan pada penegakkan hak-hak pemegang saham dengan perlakuan yang sama, transparansi dan penjelasan, serta peran dewan komisaris sebagai pihak penyelaras kepentingan manajemen dan pemegang saham. Dengan penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam praktik *corporate governance* diharapkan dapat memberikan derajat kepercayaan yang lebih tinggi bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham. Selanjutnya mekanisme tata kelola perusahaan (*corporate governance mechanism*) diharapkan dapat berpengaruh pada jumlah dan kualitas pengungkapan informasi kepada pihak luar perusahaan (*outsider*). Mekanisme tata kelola perusahaan yang baik juga dapat berdampak pada peningkatan transparansi pelaporan perusahaan kepada pihak eksternal. Dan peningkatan transparansi serta pengungkapan informasi dapat mengurangi terjadinya asimetri informasi.

2.4.1.1. Komisaris Independen dan Likuiditas

Dalam pengelolaan sebuah perusahaan tidak terlepas dari konflik kepentingan antara pemegang saham (prinsipal) dan manajemen (agen). Untuk meminimalkan terjadinya konflik kepentingan, maka perlu dilakukan upaya penyelarasan yaitu melalui mekanisme *corporate governance*. Mekanisme *corporate governance* berfokus pada fungsi pengawasan di dalam pengelolaan perusahaan. Penegakkan *corporate governance* dapat dilakukan melalui 2 (dua) mekanisme, antara lain mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal merupakan mekanisme pengawasan dengan mengoptimalkan fungsi elemen di dalam perusahaan. Sedangkan mekanisme internal merupakan mekanisme pengawasan dengan menggunakan fungsi

elemen di luar perusahaan. Nuryaman (2009) menyatakan bahwa salah satu bentuk dari penerapan mekanisme internal dalam praktik *corporate governance* adalah komposisi Dewan Komisaris. Dewan Komisaris merupakan pihak internal perusahaan yang memiliki peran penting dalam fungsi pengawasan serta penyalarsan kepentingan antara prinsipal dan agen.

Nuryaman (2009) juga menyatakan bahwa efektivitas Dewan Komisaris dapat tercermin melalui komposisinya, yaitu komposisi pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan (Komisaris Independen). Komisaris Independen merupakan bagian dari anggota Dewan Komisaris yang memiliki persyaratan independensi yang tinggi sebagaimana yang telah tercantum di dalam Surat Keputusan BAPEPAM Nomor:Kep-643/BL/2012 Nomor XI.I.5. Komposisi Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris dapat memberikan kontribusi yang positif mengenai pengungkapan informasi oleh perusahaan agar lebih transparan. Yushita,dkk (2013) menyatakan bahwa presentase jumlah Komisaris Independen di dalam Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif dalam menekan praktik manajemen laba di dalam perusahaan, hal ini disebabkan peran Komisaris Independen yang memiliki independensi yang tinggi dapat meningkatkan efektivitas kinerja Dewan Komisaris dalam pelaksanaan fungsi pengawasan pengelolaan perusahaan agar berjalan sesuai dengan semestinya. Melalui peningkatan efektivitas pengawasan, dapat meminimalkan terjadinya asimetri informasi dan meningkatkan kepercayaan investor terhadap perusahaan yang tercermin dalam likuiditas.

Dari uraian penjelasan diatas, maka penelitian ini merumuskan hipotesis alternatif :

H_{1a} : Proporsi Komisaris Independen berpengaruh positif terhadap Likuiditas

2.4.1.2. Ukuran Komite Audit dan Likuiditas

Komite Audit merupakan salah satu komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris. Surat Keputusan BAPEPAM Nomor:Kep-643/BL/2012 Nomor XI.I.5 mensyaratkan bagi perusahaan *go-public* wajib membentuk Komite Audit dengan minimal keanggotaan 3 (tiga) orang. Komite Audit memiliki fungsi pengawasan yang meliputi lingkup laporan keuangan, tata kelola perusahaan serta pengawasan perusahaan. Wewenang Komite Audit yang besar di dalam fungsi pengawasan memberikan pengaruh yang besar dalam transparansi serta akuntabilitas pengungkapan informasi oleh perusahaan kepada pemegang saham. Ukuran Komite Audit dapat memiliki keterkaitan dengan efektivitas Komite Audit dalam melakukan tanggungjawabnya. Semakin efektif kinerja Komite Audit maka semakin besar pula akuntabilitas pengelolaan perusahaan yang dapat disampaikan kepada pemegang saham. Penelitian Pertiwi (2012) menunjukkan bahwa ukuran Komite Audit memiliki hubungan positif dengan kualitas laba. Semakin tinggi kualitas laba yang dihasilkan maka akan meminimalkan asimetri informasi yang terjadi diantara prinsipal dan agen. Penurunan asimetri informasi dapat tercermin melalui likuiditas.

Dari uraian di atas, penelitian ini merumuskan hipotesis alternatif :

H_{1b} : Ukuran Komite Audit berpengaruh positif terhadap Likuiditas

2.4.1.3. Jumlah Rapat Komite Audit dan Likuiditas

Efektivitas Komite Audit dalam melakukan tanggung jawabnya dipengaruhi oleh beberapa hal, salah satunya adalah banyak sedikitnya koordinasi yang dilakukan. Koordinasi Komite Audit terwujud dalam bentuk rapat yang dilakukan baik secara terpisah maupun rapat bersama dengan Dewan Komisaris dan Dewan Direksi. Semakin banyak informasi yang dipersiapkan secara baik dan dikoordinasikan secara teratur, maka dapat memberikan kontribusi dalam upaya perbaikan pengelolaan yang ditunjukkan melalui usulan yang disampaikan kepada Dewan Komisaris. Surat Keputusan Bapepam Nomor XI.I.5 menyatakan bahwa Komite Audit diwajibkan untuk melakukan rapat minimal sama dengan jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar. Hal ini bertujuan untuk memaksimalkan kinerja Komite Audit dalam menghasilkan usulan-usulan perbaikan dalam pengelolaan perusahaan. Melalui peningkatan efektivitas kinerja yang tercermin melalui banyaknya rapat koordinasi yang dilakukan, dapat meningkatkan kepercayaan pemegang saham pula bahwa fungsi pengawasan dalam perusahaan berjalan dengan baik. Peningkatan kepercayaan pemegang saham tercermin melalui likuiditas saham perusahaan yang terdapat di bursa saham.

Dari uraian di atas, maka penelitian ini merumuskan hipotesis alternatif :

H_{1c} : Jumlah Rapat Komite Audit berpengaruh positif terhadap Likuiditas

2.4.1.4. Kepemilikan Institusional dan Likuiditas

Kepemilikan institusional merupakan bentuk dari struktur kepemilikan yang memiliki keterkaitan dengan mekanisme *corporate governance*.

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan sejumlah saham perusahaan oleh investor institusional. Pada umumnya investor institusional melakukan investasi dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan investor non-institusional. Penelitian Herawaty (2008) menjelaskan bahwa investor institusional merupakan investor yang *sophisticated* yaitu investor yang tidak mudah “dibodohi” karena memiliki kemampuan serta pengetahuan dalam menganalisis informasi perusahaan. Selain itu, investor institusional juga memiliki pengetahuan yang memadai dalam memprediksi laba di masa mendatang. Investor institusional dapat memiliki pengaruh dalam pengelolaan perusahaan melalui hak suara yang didapatkan dalam RUPS seiring dengan besarnya jumlah kepemilikannya. Investor institusional akan berusaha untuk memastikan bahwa dana yang diinvestasikan pada perusahaan dikelola dengan seharusnya. Melalui kemampuan serta jumlah kepemilikannya, investor institusional dapat memberikan tekanan kepada pihak perusahaan untuk bertindak semestinya. Semakin tinggi jumlah kepemilikan oleh investor institusional, maka semakin besar pula pengaruh yang dimilikinya di dalam perusahaan. Yushita,dkk (2013) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh investor institusional dapat secara aktif memonitor tindakan manajemen dan meningkatkan kualitas laba yang dilaporkan. Dengan peningkatan kualitas pengelolaan perusahaan yang dihasilkan melalui tekanan oleh investor institusional, maka membuat investor institusional akan tetap mempertahankan kepemilikannya pada perusahaan dan berdampak pada menurunnya likuiditas saham perusahaan di pasar modal.

Dari uraian di atas, penelitian ini merumuskan hipotesis alternatif:

H_{1d} : Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif terhadap Likuiditas

2.4.2. Manajemen Laba dan Likuiditas

Penelitian ini menggunakan praktik manajemen laba untuk mengukur variabel kualitas laba perusahaan. Manajemen laba merupakan salah satu sumber dari asimetri informasi. Tingkat praktik manajemen laba dalam perusahaan menunjukkan seberapa baik kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan. Semakin tinggi tingkat manajemen laba akan meningkatkan asimetri informasi yang terjadi antara prinsipal dan agen. Pada akhirnya hal ini dapat menurunkan reliabilitas kualitas laba yang dilaporkan perusahaan, begitu pula sebaliknya. Tingkat asimetri informasi di antara para pelaku pasar dapat tercermin melalui likuiditas. Penelitian Bar-Yosef (2013) menyebutkan bahwa tingginya tingkat manajemen laba (*earning management*) dapat meningkatkan asimetri informasi antara pihak internal (*insider*) dan pihak eksternal (*outsider*). Manajemen laba juga dapat mengurangi tingkat reliabilitas dan validitas dari laporan keuangan serta meningkatkan ketidakpastian di dalam arus kas masa depan yang diharapkan oleh investor. Richardson (2000) dalam Moh.Nasih (2014) mengemukakan bahwa terdapat hubungan antara manajemen laba (*earnings management*) dengan likuiditas saham yang diukur dengan *bid-ask spread* (B_As), yaitu semakin tinggi tingkat manajemen laba maka akan meningkatkan likuiditas saham yang tercermin dari penurunan nilai *bid_ask spread*nya.

Proksi lain yang dapat mencerminkan likuiditas adalah volume perdagangan. Volume perdagangan merupakan proksi pengukuran yang

didasarkan pada konsep kedalaman (*depth*) dari likuiditas. Menurut Bar-Yosef dan Prencipe (2013), volume perdagangan dari likuiditas mencerminkan keinginan sejumlah investor untuk membeli dan keinginan sejumlah investor lain untuk menjual, dan hal tersebut menggambarkan asimetri informasi yang terjadi diantara kedua pihak. Semakin baik kualitas laba yang dilaporkan oleh perusahaan mampu memberikan kepercayaan investor untuk menanamkan dananya di perusahaan, sehingga mampu meningkatkan likuiditas saham perusahaan melalui peningkatan volume perdagangan. Jadi penelitian ini merumuskan hipotesis bahwa manajemen laba (*earning management*) berhubungan positif dengan volume perdagangan. Bar-Yosef dan Prencipe (2013) juga mengemukakan bahwa terdapat hubungan positif antara manajemen laba dan volume perdagangan. Oleh sebab itu, penelitian ini merumuskan hipotesis :

H₂ : manajemen laba (*earning management*) berpengaruh positif terhadap likuiditas

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

3.1.1. Variabel Dependen

Variabel dependen merupakan variabel yang terikat atau variabel yang dipengaruhi. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah likuiditas. Likuiditas diukur dengan menggunakan proksi volume perdagangan.

Volume perdagangan merupakan salah satu indikator yang dapat mencerminkan likuiditas. Volume perdagangan merupakan proksi pengukuran yang didasarkan pada konsep kedalaman (*depth*) dari likuiditas. Bar-Yosef dan Prencipe (2013), volume perdagangan dari likuiditas mencerminkan keinginan investor untuk membeli sejumlah saham dan keinginan investor lain untuk menjual sejumlah saham, dan hal tersebut menggambarkan asimetri informasi yang terjadi diantara kedua pihak. Moh.Nasih (2014) juga mengemukakan bahwa volume perdagangan menggambarkan sejumlah saham yang dapat diperdagangkan tanpa berpengaruh terhadap harga saham. Bar-Yosef (2013) formula pengukuran volume perdagangan sebagai berikut :

Volume Perdagangan = log (rata-rata volume perdagangan saham bulanan)

3.1.2. Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel bebas atau variabel yang mempengaruhi. Dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) variabel independen yaitu kualitas tata kelola perusahaan (*corporate governance quality*) dan

manajemen laba (*earnings management*), yang mencerminkan tingkat asimetri informasi.

3.1.2.1. Corporate Governance

FCGI (2005) menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan seperangkat peraturan yang mengatur dan mengendalikan perusahaan yang bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Bar-Yosef dan Prencipe (2013) yang menjadi jurnal acuan dalam penelitian ini, mengukur kualitas *corporate governance* menggunakan 2 proksi yaitu komposisi direktur independen dan dualitas CEO. Seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, hal ini dilatarbelakangi oleh objek penelitian yang berada di Italia menerapkan sistem *one-tier*. Penelitian ini melakukan penyesuaian dengan kondisi yang ada di Indonesia yang menerapkan sistem *two-tier*. FCGI (2005) menyatakan bahwa secara lebih rinci terminologi *corporate governance* dapat digunakan untuk menjelaskan peranan serta perilaku berbagai pihak yang mengelola perusahaan. Penelitian ini menggunakan 4 (empat) proksi untuk mengukur kualitas *corporate governance*, antara lain :

3.1.2.1.1. Proporsi Komisaris Independen

Dewan Komisaris memiliki peranan yang penting dalam penegakkan *Good Corporate governance* (GCG) dalam sebuah entitas. Dewan komisaris merupakan pihak yang memiliki wewenang untuk menyelaraskan konflik kepentingan yang terjadi di antara prinsipal dan agen. Dewan komisaris terdiri dari dari pihak-pihak yang mewakili prinsipal dan agen, serta pihak lain yang dianggap independen dan tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan

prinsipal maupun agen. Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar perusahaan dan bukan merupakan pihak yang terafiliasi dengan perusahaan. Nuryaman (2009) merumuskan pengukuran proporsi Komisaris Independen sebagai berikut :

$$\text{Proporsi Komisaris Independen} = \frac{\text{jumlah anggota Komisaris Independen}}{\text{jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris}}$$

3.1.2.1.2. Ukuran Komite Audit

Komite Audit merupakan komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dan memiliki wewenang dalam penerapan praktik *corporate governance*. Ruang lingkup wewenang yang dimiliki oleh Komite Audit meliputi kontrol terhadap laporan keuangan, tata kelola perusahaan dan pengawasan perusahaan. Seiring besarnya wewenang serta tanggung jawab Komite Audit, jumlah personil Komite Audit memiliki keterkaitan dengan efektivitas kinerja yang dihasilkan oleh Komite Audit. Surat Keputusan BAPEPAM Nomor:Kep-643/BL/2012 Nomor XI.1.5 mensyaratkan minimal jumlah keanggotaan Komite Audit sebanyak 3 (tiga) orang. Penelitian ini merumuskan ukuran Komite Audit sebagai berikut :

$$\text{Ukuran Komite Audit} = \text{Jumlah Anggota Komite Audit}$$

3.1.2.1.3. Jumlah Rapat Komite Audit

Selain Ukuran Komite Audit, faktor yang mendukung peningkatan efektivitas Komite Audit adalah banyaknya koordinasi yang dilakukan oleh seluruh anggota Komite Audit. Koordinasi ini terwujud dalam bentuk rapat koordinasi, baik secara terpisah maupun gabungan dengan Dewan Komisaris

dan Dewan Direksi. Koordinasi melalui rapat bertujuan untuk mengolah informasi yang telah ditemukan dalam proses pengawasan dan selanjutnya menghasilkan usulan-usulan terbaik kepada Dewan Komisaris sebagai bentuk upaya perbaikan pengelolaan perusahaan. Surat Keputusan BAPEPAM Nomor:Kep-643/BL/2012 Nomor XI.I.5 mensyaratkan jumlah rapat yang harus dilaksanakan oleh Komite Audit minimal sama dengan jumlah rapat Dewan Komisaris yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar. Penelitian ini merumuskan Jumlah Rapat Komite Audit sebagai berikut :

Jumlah Rapat Komite Audit = Jumlah Rapat Komite Audit dalam satu periode

3.1.2.1.4. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan Institusional merupakan kepemilikan sejumlah saham perusahaan oleh investor institusional. Pada umumnya, investor institusional melakukan investasi dana dalam jumlah yang lebih besar dibandingkan dengan investor non-institusional. Semakin besar kepemilikan saham pada perusahaan, maka semakin besar pula wewenang yang dimiliki oleh pemegang saham. Begitu pula dengan investor institusional yang memiliki wewenang lebih besar dalam mempengaruhi mekanisme pengelolaan perusahaan. Herawaty (2008) menyatakan bahwa investor institusional dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan perusahaan serta meminimalkan praktik manajemen laba. Yushita,dkk (2013) merumuskan kepemilikan institusional sebagai berikut:

Kepemilikan Institusional = $\frac{\text{jumlah kepemilikan saham oleh investor institusional}}{\text{jumlah saham beredar}}$

3.1.2.2. Manajemen Laba

Selain *Corporate Governance*, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah Manajemen Laba. Penelitian ini menggunakan pengukuran *discretionary accrual* dengan *Modified Jones* (1991) untuk mendeteksi tingkat praktik Manajemen Laba. Pengukuran Manajemen Laba dengan menggunakan *Modified Jones* membagi total akrual menjadi 2 (dua) yaitu komponen *non-discretionary accrual* dan komponen *discretionary accrual*. *Discretionary accrual* mencerminkan komponen yang dapat dimanipulasi oleh manajer. Pengukuran *Modified Jones* meliputi 4 (empat) tahapan, antara lain:

1. Mengukur *total accrual* yang dihitung dengan rumus :

Total Accrual (TAC) = laba bersih setelah pajak (net income) – arus kas operasi (cash flow from operating)

2. Menghitung nilai accrual yang diestimasi dengan persamaan regresi OLS (*Ordinary Least Square*).

$$TAC_t/A_{t-1} = \alpha_1 (1/A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t/A_{t-1}) + \alpha_3 (PPE_t/A_{t-1}) + e$$

Keterangan :

TAC_t : *total accrual* perusahaan i pada periode t

A_{t-1} : total aset perusahaan i pada akhir tahun t-1

ΔREV_t : selisih pendapatan perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

PPE_t : aktiva tetap (*property, plant and equipment*) perusahaan i pada akhir tahun t

3. Menghitung *non-discretionary accrual* dengan rumus sebagai berikut :

$$NDA_t = \alpha_1 (1/A_{t-1}) + \alpha_2 (\Delta REV_t - \Delta REC_t / A_{t-1}) + \alpha_3 (PPE_t / A_{t-1}) + e$$

Keterangan :

ΔREC_t : perubahan piutang perusahaan i dari tahun t-1 ke tahun t

NDA_t : *non-discretionary accrual* pada tahun t

α : *fitted coefficient* yang diperoleh dari hasil regresi OLS *total accrual*

4. Menghitung nilai *discretionary accrual* dengan rumus :

$$DA_{it} = (TAC_t / A_{t-1}) - NDA_t$$

3.1.3. Variabel Kontrol

Variabel kontrol merupakan variabel yang mempengaruhi variabel dependen selain variabel independen. Penelitian ini akan menggunakan beberapa variabel kontrol yaitu *return on asset (ROA)*, *financial leverage*. McNichols & O'Brien (1997) dalam Bar-Yosef dan Prencipe (2013) menyatakan bahwa ROA sebagai ukuran dari profitabilitas memiliki berkaitan dengan preferensi investor yang pada akhirnya berpengaruh terhadap likuiditas. Return on Asset (ROA) dihitung dengan rumus:

$$ROA = \frac{\text{laba operasi (operating income)}}{\text{total aset}}$$

Amihud dan Mendelson (2012) dalam Bar-Yosef dan Prencipe (2013) berpendapat bahwa *financial leverage* berpengaruh terhadap likuiditas pasar. *Financial leverage* dihitung dengan rumus:

$$LEV = \frac{\text{total liabilitas}}{\text{total aset}}$$

3.2. Populasi dan Sampel

Bursa Efek Indonesia

Terjadi krisis ekonomi tahun 1997-1998 yang melanda Asia, termasuk Indonesia menyadarkan banyak pihak akan pentingnya suatu komunitas terintegrasi baik di dalam negeri maupun di luar negeri yang bertujuan untuk membangun kekuatan ekonomi nasional. Salah satunya melalui pengembangan pasar modal. Pasar modal yang dikembangkan dengan baik dapat saling mendukung dengan sistem perbankan yang stabil dapat digunakan sebagai alternatif pembiayaan jangka panjang bagi perusahaan dan sarana investasi bagi investor.

Pasar Modal Indonesia telah mengalami banyak transformasi, salah satunya melalui peleburan Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES) yang saat ini menjadi Bursa Efek Indonesia (BEI). Bursa Efek Indonesia menjadi tempat utama untuk perdagangan Efek, seperti saham, obligasi, sukuk dan derivatif (*Indonesian Corporate Governance Roadmap*).

Salah satu indeks penilaian terhadap perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia adalah LQ 45. Indeks LQ 45 menggunakan 45 emiten yang dipilih berdasarkan pertimbangan likuiditas dan kapitalisasi pasar, dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan. Indeks LQ 45 diperbaharui setiap 6 (enam) bulan sekali, yaitu periode Februari-Juli dan Agustus-Januari. Sehingga dapat dikatakan bahwa perusahaan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 merupakan perusahaan yang memiliki saham paling likuid di Bursa

Efek Indonesia. Faktor-faktor di bawah ini dipergunakan sebagai kriteria suatu emiten untuk dapat masuk dalam perhitungan indeks LQ 45 adalah:

1. Telah tercatat di BEI minimal 3 bulan.
2. Aktivitas transaksi di pasar reguler yaitu nilai , volume dan frekuensi transaksi.
3. Jumlah hari perdagangan di pasar reguler.
4. Kapitalisasi pasar pada periode waktu tertentu.
5. Selain mempertimbangkan kriteria likuiditas dan kapitalisasi pasar tersebut di atas, akan dilihat juga keadaan keuangan dan prospek pertumbuhan perusahaan tersebut.

3.2.1. Populasi

Populasi untuk pengujian hipotesis dalam penelitian ini ada seluruh perusahaan *go-public* yang terdaftar di BEI. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan non keuangan yang terdaftar dalam indeks LQ 45 tahun 2012-2013.

3.2.2. Sampel

Alasan pemilihan indeks LQ 45 sebagai sampel dalam penelitian ini karena indeks LQ 45 mencerminkan perusahaan-perusahaan yang memiliki tingkat likuiditas saham yang tinggi sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih akurat mengenai penilaian terhadap likuiditas yang diteliti dalam penelitian ini.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Teknik ini memilih kelompok target untuk memperoleh informasi sesuai dengan kriteria tertentu. Adapun kriteria yang digunakan untuk penentuan sampel adalah sebagai berikut :

- a. Perusahaan non-keuangan yang *listing* di Bursa Efek Indonesia dan terdaftar dalam indeks LQ 45 selama tahun 2011-2013 (tanpa pernah mengalami *delisting*)
- b. Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan dengan mata uang rupiah
- c. Perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan serta annual report yang berisi seluruh informasi yang relevan dengan data yang dibutuhkan dalam penelitian
- d. Perusahaan yang mempunyai data perdagangan saham secara lengkap

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia (BEI). Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh dari pihak lain (tidak secara langsung dari narasumber).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

- Data perusahaan non-keuangan yang termasuk dalam indeks LQ45 selama tahun 2011-2013
- Data annual report perusahaan sampel serta seluruh informasi yang relevan dengan penelitian selama tahun 2011-2013
- Data rekapitulasi informasi tahunan perusahaan sampel yang terdapat dalam *Indonesia Capital Market Directory (ICMD)*

Data sekunder tersebut diperoleh dari Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Cabang Semarang dan www.idx.co.id.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi. Metode dokumentasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengkaji dan menelaah data yang digunakan, selanjutnya dilakukan pengujian dan analisis. Informasi mengenai komisar independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit, dan volume perdagangan diperoleh dari *annual report* perusahaan sampel. Informasi komponen-komponen penghitungan *discretionary accrual* diperoleh dari laporan keuangan perusahaan sampel. Sedangkan informasi kepemilikan institusional diperoleh dari ICMD perusahaan sampel.

3.5. Analisis Data

Tujuan dari analisis data adalah mendapatkan informasi relevan yang dari data yang diolah dan menggunakan informasi tersebut untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti (Ghozali, 2011). Secara umum, metode analisis data dibagi menjadi 2 (dua), yaitu metode dependen dan metode interdependen. Metode dependen menguji ada atau tidaknya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat. Sedangkan metode interdependen menguji hubungan antara set data yang tidak dapat dimasukkan dalam kategori variabel bebas maupun variabel terikat. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini ada metode dependen karena penelitian ini menguji pengaruh dari variabel bebas (*corporate governance* dan manajemen laba) terhadap variabel terikat (likuiditas). Uji statistik yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan statistik

deskriptif dan regresi linier berganda karena penelitian ini menguji pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas (metrik) terhadap satu variabel terikat (metrik). Untuk mempermudah proses pengujian dan analisis, digunakan *software* SPSS (*Statistical Package for Social Science*) yang dapat digunakan untuk melakukan pengujian data baik parametrik maupun non-parametrik.

3.5.1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan salah satu pengujian yang bertujuan untuk menggambarkan data yang digunakan dalam proses pengujian. Komponen yang digambarkan meliputi: nilai rata-rata (*mean*), standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, range, serta kemencengan distribusi (*skewness*).

3.5.2. Uji Asumsi Klasik

Sebelum dilakukan pengujian regresi linier berganda, set data yang telah diperoleh diharuskan untuk memenuhi Uji Asumsi Klasik, meliputi :

3.5.2.1. Uji Normalitas

Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual (*error*) dari data yang diuji dalam model regresi terdistribusi secara normal atau tidak (Ghozali,2011). Model regresi yang baik mengharapkan nilai residual (*error*) terdistribusi secara normal. Terdapat 2 (dua) cara untuk menguji asumsi normalitas, yaitu:

a) Analisis Grafik

Analisis grafik dapat menggunakan 2 (dua) jenis grafik, yaitu histogram dan garis diagonal. Pada grafik histogram, nilai residual (*error*) yang terdistribusi secara normal akan mengikuti bentuk kurva lonceng. Sedangkan

pada grafik garis diagonal, nilai residual (*error*) yang terdistribusi secara normal akan membentuk plot yang berhimpit dengan garis diagonal.

b) Nilai *Kolmogorov-Smirnov* (KS)

Pengujian asumsi normalitas juga dapat dilakukan melalui nilai *Kolmogorov-Smirnov* (KS). Data yang memiliki nilai residual (*error*) yang terdistribusi secara normal akan menunjukkan nilai signifikansi > 0.05 .

3.5.2.2. Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat hubungan (korelasi) antar variabel independen atau tidak (Ghozali, 2011). Data yang ideal adalah data yang tidak menyalahi asumsi multikolinearitas, yaitu tidak ada korelasi antar variabel independen dalam data yang diteliti. Untuk menguji asumsi multikolinearitas dapat dilakukan dalam beberapa cara, yaitu:

- a. Pada tabel *coefficient*, nilai VIF < 10 atau nilai tolerance > 0.10
- b. Pada tabel *coefficient correlations*, nilai matrik antar variabel independen tidak boleh lebih dari 90%

3.5.2.3. Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah terdapat hubungan (korelasi) antar nilai residual (*error*) (Ghozali, 2011). Data yang ideal merupakan data yang tidak menyalahi asumsi autokorelasi, yaitu tidak terdapat hubungan (korelasi) antar nilai residual (*error*) dalam data yang diteliti. Untuk menguji asumsi autokorelasi dapat dilakukan dengan melihat nilai Durbin-Watson (DW). Kriteria yang harus dipenuhi untuk membuktikan bahwa tidak terjadi autokorelasi adalah $du < DW < (4-du)$.

3.5.2.4. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah terdapat ketidaksamaan varian antar nilai residual (*error*) (Ghozali,2011). Data yang ideal adalah yang tidak menyalahi asumsi heteroskedastisitas, yaitu tidak terdapat kesamaan varian antar nilai residual (*error*). Untuk menguji asumsi heteroskedastisitas menggunakan grafik *scatter plot* dan Uji Glejser. Data yang tidak menyalahi asumsi heteroskedastisitas akan membentuk grafik *scatter plot* yang menyebar. Apabila grafik *scatter plot* membentuk sebuah pola atau mengumpul menunjukkan bahwa terdapat kesamaan varian antar nilai residual (*error*). Hal ini dikenal dengan homoskedastisitas, dan tidak sesuai dengan yang dipersyaratkan dalam asumsi heteroskedastisitas.

Dalam Uji Glejser data yang memenuhi asumsi heteroskedastisitas akan menunjukkan probabilitas signifikansi masing-masing variabel independen di atas 0,05, begitu pula sebaliknya.

3.5.3. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis Regresi Linier Berganda merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (variabel bebas) terhadap variabel dependen (variabel terikat) (Ghozali,2011). Penelitian ini menguji pengaruh *corporate governance* (dengan proksi komisararis independen, ukuran komite audit, jumlah rapat komite audit dan kepemilikan institusional) dan manajemen laba (dengan proksi *discretionary accrual*) terhadap likuiditas (dengan proksi volume perdagangan). Persamaan regresi penelitian ini adalah:

$$VOLUME_{it} = \beta_0 + \beta_1 KOMIND_{it} + \beta_2 UKA_{it} + \beta_3 JRK_{it} - \beta_4 KEPINST_{it} + \beta_5 DACC_{it} + \beta_6 ROA_{it} + \beta_7 LEV_{it} + \varepsilon_{it}$$

VOLUME_{it} : Rata-rata volume perdagangan pada tahun t

KOMIND_{it} : Proporsi Komisaris Independen dalam Dewan Komisaris pada tahun t

UKA_{it} : Jumlah anggota Komite Audit pada tahun t

JRK_{it} : Jumlah rapat Komite Audit pada tahun t

KEPINST_{it} : kepemilikan saham oleh investor institusional pada tahun t

DACC_{it} : nilai *discretionary accrual* pada tahun t

ROA_{it} : *return on asset* pada tahun t

LEV_{it} : *leverage* pada tahun t

ε_{it} : nilai residual (*error*)

3.5.4. Uji Hipotesis

Pada bab sebelumnya telah dikembangkan hipotesis yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Dalam menguji kesesuaian hipotesis tersebut dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

3.5.4.1. Koefisien Determinasi (R²)

Nilai R² menunjukkan presentase kontribusi variabel independen terhadap variabel dependen. Dari nilai R² dapat diketahui seberapa besar variabel dependen mampu dijelaskan oleh variabel independen, dan sisanya

dijelaskan oleh faktor-faktor lain diluar model. Semakin besar presentase kontribusi yang ditunjukkan variabel independen terhadap variabel dependen menunjukkan bahwa semakin baik model penelitian tersebut.

3.5.4.2. Uji Statistik F

Uji Statistik F bertujuan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel dependen. Uji Statistik F dapat ditentukan dengan melihat nilai F hitung atau signifikansinya (sig) yang terdapat pada tabel ANOVA. Kriteria yang digunakan untuk Uji Statistik F yaitu:

- Apabila $\text{sig} < \alpha$, maka H_0 ditolak
- Apabila $\text{sig} > \alpha$, maka H_0 tidak ditolak

3.5.4.3. Uji Statistik t

Uji Statistik t bertujuan untuk menguji seberapa besar pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji statistik t dapat ketahui dengan melihat nilai t hitung atau nilai signifikansi (sig) masing-masing variabel independen yang terdapat dalam tabel *coefficient*. Kriteria yang digunakan untuk Uji Statistik t yaitu:

- Apabila $\text{sig} < \alpha$, maka H_0 ditolak
- Apabila $\text{sig} > \alpha$, maka H_0 tidak ditolak